

Analisis Dampak Kebijakan Audit Dana Desa Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa Oleh Inspektorat Kota Prabumulih***Analysis Impact Of The Village Fund Audit Policy Using The Village Financial Monitoring System Application By Prabumulih City Inspectorate*****Eko Subri Marleansyah^{1*}, Eva Novaria²⁾, Atrika Iriani³⁾**¹ Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka Indonesia³ STISIPOL Candradimuka Indonesia*Email correspondences: ekosubri81@google.com**ABSTRAK**

Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa menggunakan Microsoft SQL Server. Ukuran database ini relatif besar karena berbasis database Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa yang berupa laporan kompilasi anggaran dan realisasi APBDesa Tingkat Kabupaten/ Kota. Syarat Utama agar Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa berjalan adalah kabupaten/kota serta desa-desa diwilayahnya sudah mengimplementasikan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Agar Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa dapat berjalan optimal, diperlukan syarat-syarat teknis bagi pengguna aplikasi yaitu: Komputer sudah terinstal Microsoft SQL Server dan telah tersedia database Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa kompilasi tingkat kabupaten. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Dampak Dampak Kebijakan Audit Dana Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kota Prabumulih. Hal yang diidentifikasi yaitu: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kota Prabumulih belum begitu menguasai aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa serta Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara Inspektorat Kota Prabumulih dengan perangkat desa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa: dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa telah memberikan dampak positif terhadap kebijakan audit dana desa. Walaupun masih terdapat kendala/ hambatan dengan Kebijakan Audit Dana Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa seperti Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kota Prabumulih belum begitu menguasai aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa serta Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara Inspektorat Kota Prabumulih dengan perangkat desa

Kata Kunci: Dampak, Audit, Kebijakan, APIP, Dana Desa**ABSTRACT**

The Village Financial Monitoring System application uses Microsoft SQL Server. The size of this database is relatively large because it is based on the Village Financial Oversight System Application database in the form of a budget compilation report and the realization of the Village APBDes at the District/City Level. The main requirement for the Village Financial Monitoring System Application to work is that districts/cities and villages in their area have implemented the Village Financial Monitoring System Application. In order for the Village Financial Supervision System Application to run optimally, technical requirements are required for application users,

namely: The computer has Microsoft SQL Server installed and the Village Financial Supervision System Application database is available at the district level compilation. The purpose of this study is to analyze the Impact of the Village Fund Audit Policy using the Village Financial Monitoring System Application by the Prabumulih City Inspectorate. The things that were identified were: The Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the Prabumulih City Inspectorate had not yet mastered the application of the Village Financial Oversight System and limited knowledge and understanding of human resources, ineffective communication between the Prabumulih City Inspectorate and village officials. The data analysis technique used in this study is a qualitative data analysis technique. This study shows that: using the Village Financial Oversight System Application has had a positive impact on village fund audit policies. Even though there are still obstacles/obstacles with the Village Fund Audit Policy by using the Village Financial Oversight System Application such as the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) at the City Inspectorate Prabumulih has not mastered the application of the Village Financial Oversight System as well as limited knowledge and understanding of human resources, ineffective communication between the Prabumulih City Inspectorate and village officials

Keywords: *Impact, Audit, Village Financial , Application*

PENDAHULUAN

Pelaporan pada hakekatnya adalah suatu jenis kewajiban untuk secara berkala memberikan informasi dan mengungkapkan kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak yang berwenang melalui media pelaporan. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berhak mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu pemerintah desa harus dapat menerapkan asas tanggung jawab dalam penyelenggaraannya, dimana segala kegiatan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa diterbitkan sebagai bentuk

pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Memahami akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan pemerintah kini menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan publik. Akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan kegagalan administrasi, keputusan kebijakan yang buruk dan tingkat korupsi yang tinggi. Kajian Manajemen Ekonomi Desa KPK menemukan bahwa ada potensi korupsi dalam pengelolaan keuangan desa, yang tercermin dalam masalah yang berkaitan dengan manajemen, yaitu hal-hal yang terkait ke administrasi. Untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, BPKP telah mengembangkan aplikasi keuangan desa (Siskeudes), dimana Deputi Pengawas Badan Keuangan Daerah dan Badan Pengawasan Utama Kementerian Dalam Negeri melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa yang terkait dengan tanggung jawab keuangan desa. Untuk memantau aplikasi keuangan desa (Siskeudes), juga dikembangkan penerapan sistem pengendalian keuangan desa di

Siskeudes. Untuk membantu pengendalian kabupaten/kota dalam pengendalian pengelolaan keuangan desa, digunakan penerapan sistem pengendalian pemerintahan desa yang didasarkan pada penerapan sistem pemerintahan desa yang dikembangkan bersama oleh wakil pengendalian ekonomi daerah dan kepala desa. Aplikasi Sistem Pemantauan Keuangan Desa merupakan sarana bagi kabupaten/kota untuk memantau pengelolaan keuangan desa. Penerapan sistem pengendalian ekonomi desa dikembangkan bersama-sama dengan Badan

Pendukung Pengendalian Keuangan Daerah BPKP dan Badan Pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Peraturan urusan dalam negeri tentang tata cara pemeriksaan badan keuangan desa. Keseluruhan struktur sistem pemantauan keuangan desa terdiri dari parameter, tinjauan terpadu, audit terperinci, dan pelaporan. Aplikasi Sistem Pemantauan Keuangan Desa ini menggunakan Microsoft SQL Server. Volume database ini relatif besar, karena berbasis database aplikasi sistem pengendalian keuangan desa laporan anggaran dan pelaksanaan APB Desa tingkat kabupaten/kota. 2. Database aplikasi sistem pengendalian keuangan desa disiapkan di tingkat kabupaten. b) Aplikasi database sistem pengendalian keuangan desa Namun dalam kebijakan audit dana desa masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi sistem pengawasan keuangan desa kontrol kota Prabumulih, misalnya: 1. Alat Pengendalian Intern (APIP) Badan Pengawasan Kota Prabumulih tidak mengatur dengan baik pelaksanaan

sistem pengendalian keuangan desa. Hal ini dikarenakan aplikasi ini baru dirilis sehingga perlu pembelajaran dan adaptasi, serta latar belakang pelatihan Aparat Pengawasan Dalam Negeri (APIP) Inspektorat Kota Prabumulih yang belum semuanya memiliki pelatihan komputer atau informasi. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara Inspektorat Kota Prabumulih dengan perangkat desa. Dan masih sedikit aparat desa yang mengetahui cara menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang bisa langsung terkoneksi dengan aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes). Permasalahan di atas menunjukkan bahwa kebijakan audit kinerja dana desa menggunakan sistem pengendalian keuangan desa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul "Analisis Pengaruh Kebijakan Pengendalian Dana Desa Terhadap Implementasi Sistem Pengawasan Ekonomi Desa Dinas Inspeksi Kota Prabumulih"

Evaluasi Dampak Menurut Samodra Wibawa

1. Pengaruh individu

Dampak pada orang ini mungkin menyangkut aspek-aspek berikut:

- A. Efek psikis
- b) dampak lingkungan
- C. Dampak ekonomi
- D. Dampak sosial dan pribadi.

2. Efek organisasi

Suatu organisasi atau kelompok dapat merasakan dampak dari suatu kebijakan baik secara langsung maupun tidak

langsung. Pengaruh langsung dapat mengganggu atau membantu dalam mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Pada saat yang sama, politik juga dapat memberikan pengaruh tidak langsung terhadap suatu organisasi atau kelompok, misalnya dengan meningkatkan moral dan disiplin para anggota organisasi atau kelompok tersebut.

3. Dampak terhadap masyarakat

Dampak politik terhadap masyarakat menunjukkan seberapa besar pengaruh politik terhadap kemampuan masyarakat untuk melayani anggotanya, karena masyarakat merupakan entitas yang melayani anggotanya.

4. Dampak terhadap kelembagaan dan sistem sosial.

Ada beberapa indikator yang dapat dijadikan pedoman dasar untuk menentukan lemah atau tidaknya suatu sistem sosial, yaitu: (1) kelebihan penduduk; (2) distribusi tidak merata; (3) penyediaan sumber daya yang dianggap tidak mencukupi; (4) penyesuaian yang buruk; (5) koordinasi yang buruk; (6) hilangnya legitimasi; (7) berkurangnya rasa percaya diri; (8) mekanisme koreksi dan penyesuaian tertutup diganti dengan sistem kuota.

Evaluasi Dampak Kebijakan (Samodra Wibawa)

Evaluasi kebijakan harus memperhatikan dampak yang akan terjadi pada unit sosial yang terkena dampak. Dampak dapat terjadi pada individu, organisasi, masyarakat, dan sistem sosial. Dampak pada individu mencakup aspek psikis, lingkungan, ekonomi, sosial, dan personal. Dampak organisasional bisa menimbulkan terganggunya atau terbantunya pencapaian tujuan organisasi

atau kelompok, serta peningkatan semangat kerja dan kedisiplinan. Dampak pada masyarakat mencerminkan kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dampak pada lembaga dan sistem sosial direfleksikan dalam indikator kelebihan beban, distribusi tidak merata, persediaan sumber daya yang dianggap kurang, adaptasi yang lemah, koordinasi yang jelek, turunnya legitimasi dan kepercayaan, dan tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi. Teori ini menjadi dasar dalam penelitian untuk mengevaluasi dampak kebijakan yang diharapkan dan tidak diharapkan.

Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa

Sistem pemantauan ekonomi desa harus memfasilitasi pengendalian keuangan desa dengan bantuan sistem pemantauan ekonomi desa, peringkat desa dapat ditentukan berdasarkan faktor risiko ekonomi dan non ekonomi, setelah itu dilakukan pengendalian ekonomi desa secara menyeluruh. Aplikasi Sistem Pemantauan Keuangan Desa adalah alat bantu kabupaten/kota untuk memantau pengelolaan keuangan desa. Aplikasi sistem pengendalian ekonomi desa dikembangkan bersama dengan wakil direktur pengendalian keuangan daerah BPKP dan otoritas kontrol Kementerian Dalam Negeri. Penerapan sistem pemantauan ekonomi desa dikembangkan berdasarkan rancangan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian pengelolaan keuangan desa. Keseluruhan struktur sistem pemantauan keuangan desa terdiri dari parameter, tinjauan terpadu, audit terperinci, dan pelaporan. Aplikasi Sistem Pemantauan

Keuangan Desa ini menggunakan Microsoft SQL Server. Volume database ini relatif besar, karena berbasis database aplikasi sistem pengendalian keuangan desa laporan anggaran dan pelaksanaan APB Desa tingkat kabupaten/kota. Syarat terpenting agar penerapan sistem pemantauan pengelolaan desa dapat berjalan adalah kabupaten/kota dan desa-desa di wilayah tersebut telah menerapkan sistem pemantauan pengelolaan desa. 2. Database aplikasi sistem pengendalian keuangan desa disiapkan di tingkat kabupaten. b) Aplikasi database sistem pengendalian keuangan desa C. Database sistem pengendalian keuangan desa tingkat keempat

METODE PENELITIAN

Perspektif pendekatan penelitian Analisis Dampak Kebijakan Audit Dana Desa Dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa Oleh Inspektorat Kota Prabumulih merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan audit desa melalui Aplikasi Sistem Pengendalian Keuangan Desa Prabumulih. Oleh Kantor Pengawas Kota.

Model penelitian ini menggunakan dampak kebijakan menurut Wibawa (1994 : 53-59), dapat jelaskan bahwa Dampak Kebijakan Audit Dana Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa oleh Inspektorat Kota Prabumulih diamati dengan menggunakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan yang mencakup:

Dampak Organisasional, terdiri dari:

- a. Dampak langsung
- b. Dampak tidak langsung

Dampak pada lembaga dan sistem sosial, terdiri dari:

a. Memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan keuangan Desa Dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa

b. Mendorong perangkat desa meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Dampak Langsung

1. Pengelolaan Keuangan Dana Desa menjadi lebih transparan

Hal ini terlihat pada pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota yang juga harus menginformasikan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat. Ini semacam transparansi, yang menjadi prinsip pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan publikasi peraturan APBDesa wajib diberitahukan kepada masyarakat secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan menggunakan media yang mudah diakses, antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan lain-lain. Masyarakat dapat menggunakan informasi yang diberikan oleh kepala desa mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan keinginan, saran dan pendapat secara bertanggung jawab secara lisan atau tertulis untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, dukungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2. Potensi Terjadinya Kecurangan/Fraud Lebih Kecil

Praktik Pengendalian Dana Desa Prabumulih Kota dengan penerapan sistem pengawasan keuangan desa berdampak pada organisasi yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Hal ini terlihat dari monitoring dana desa yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga AJP harus menyiapkan program monitoring dana desa yang dapat berperan sebagai inisiatif preventif bukan preventif atau APIP. Kayu Agung.

3. Laporan Keuangan Dana Desa Menjadi Lebih Akuntabel Dan Tersiapkan

Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa dewan kota Prabumulih berkewajiban untuk bertanggung jawab dan mengajukan pengelolaan keuangan desa sesuai § 44 ayat 44 ayat. 2. Peraturan Keuangan Pemerintahan Desa tentang Urusan Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Badan Desa wajib menyusun laporan pelaksanaan APB Desa yang disampaikan kepada kepala negara/walikota dan dibuat dengan acuan Menteri. Hal ini menegaskan bahwa tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemkot Prabumulih kepada Pemerintah Desa dilakukan secara bertanggung jawab dan diberkaskan.

Dampak Tidak Langsung

1. Memudahkan Pihak-Pihak Berkepentingan Baik Pusat Maupun Daerah Dalam Memantau Laporan Keuangan Dana Desa

Kebenaran penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan

membuat usulan untuk memperbaiki kelemahan dalam pengelolaan dana desa.

Sementara itu, pengendalian dana desa dilakukan oleh Inspektorat Kota Prabumulih yang memberikan perintah tentang tata cara penyaluran dan alokasi dana desa, mentransfer dana desa dari RKUD ke RKD dan menyampaikan laporan penggunaan penyaluran. dana desa, sisa dana desa dalam RKUD dan output dana desa.

2. Meringankan Beban Kerja Audit Keuangan Dana Desa

Hal ini terlihat pada penerapan sistem pengendalian keuangan desa yang membantu mengurangi beban kerja pemeriksaan keuangan dana desa. Keterampilan yang harus dimiliki oleh auditor dalam melakukan audit keuangan dana desa adalah sebagai berikut: 1) Evaluasi terhadap kegiatan atau informasi yang disajikan dibandingkan dengan kerangka yang diakui atau kriteria yang telah ditentukan, 2) Pengumpulan bukti yang mendukung evaluasi.

3) Meningkatkan Semangat Kerja Dan Disiplin Auditor Inspektorat Kota Prabumulih Dalam Pengawasan Dana Desa

Pengorganisasian tersebut dipengaruhi oleh kebijakan audit Dana Desa Kendali Kota Prabumulih yang menggunakan penerapan sistem pengendalian keuangan desa yaitu peningkatan semangat dan kedisiplinan para auditor Dana Desa Kendali Kota Prabumulih dalam pengawasan desa.

Hal ini terlihat dari semangat dan kedisiplinan kerja auditor yang meningkatkan tanggung jawab auditor terhadap pekerjaan audit Kylarahasto

dengan menggunakan aplikasi sistem Kylätoluden Seuranta buatannya.

Dampak Pada Lembaga Dan Sistem Sosial

1. Memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan keuangan Desa Dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa

Kebijakan audit keuangan desa pengendalian kota prabumulih dengan sistem pengawasan keuangan desa berdampak pada pranata dan sistem sosial yaitu memfasilitasi pelaksanaan pengawasan keuangan desa melalui sistem pengawasan keuangan desa. Sesuai Standar Audit Internal Indonesia tahun 2013, Pemerintah Kota Prabumulih dapat memantau pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan model audit. Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa oleh kantor pemeriksa dapat dilakukan dalam beberapa tahapan dan tahapan kerja pemeriksaan, dimana setiap tahapan memiliki tujuan yang harus dicapai pemeriksa yaitu. Namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan keuangan desa, antara lain Alat Pengendalian Intern (APIP) Badan Pengawasan Keuangan Desa Prabumulih yang tidak mengendalikan pelaksanaan sistem pengendalian keuangan desa.

2. Mendorong Perangkat Desa Meningkatkan Kemampuan Dalam Mengelola Keuangan Desa

Kebijakan Dana Kendali Desa Kendali Kota Prabumulih bersama-sama dengan penerapan sistem pengawasan ekonomi desa tidak mempengaruhi kelembagaan dan sistem kemasyarakatan, yaitu.

Penyebabnya, aparat desa kurang memahami sistem pengendalian keuangan desa.

Dan masih sedikit aparat desa yang mengetahui cara menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang dapat langsung terhubung dengan sistem pengendalian keuangan desa (Siswaskeudes).

PEMBAHASAN

Berdasarkan mekanisme yang berlaku saat ini mengenai analisis efektifitas kebijakan pemeriksaan dana desa dengan menggunakan penerapan sistem pengendalian keuangan desa dinas pengendalian kota prabumulih dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian keuangan desa berdampak positif. Meskipun masih terdapat hambatan/hambatan dalam kebijakan audit dana desa untuk menggunakan aplikasi sistem pengendalian keuangan desa (misal: Perangkat Audit Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kota Prabumulih, belum mengelola penerapan sistem pengendalian keuangan desa serta Pengetahuan yang kurang baik . Lester dan Stewart (2000) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan pada dasarnya adalah studi tentang konsekuensi kebijakan publik. Anderson (1979) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan menitikberatkan pada evaluasi, penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan (proses) dan konsekuensi (efek). Sebagai kegiatan operasional, evaluasi kebijakan dilakukan pada semua tahapan, tidak hanya pada tahapan akhir. Menilai dampak kebijakan merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh evaluator dalam evaluasi kebijakan. Evaluasi

dampak lebih berfokus pada produk dan dampak daripada proses. Menurut Anderson dalam Islamy (1984:115), kebijakan ini memiliki beberapa dimensi yaitu: 1. Konsekuensi yang diinginkan dan tidak diinginkan 2. Penolakan terhadap situasi atau praktik individu (kelompok) yang bukan merupakan sasaran/sasaran utama kebijakan. 3. Efek dari kebijakan tersebut dapat muncul atau mempengaruhi kondisi saat ini atau yang akan datang. 5. Dampak politik terhadap biaya tidak langsung Dimensi ini merupakan dimensi penting terkait dengan kebijakan yang memiliki efek saat ini dan masa depan. Evaluator harus menyadari efek yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan harapan Dampak yang dialami secara individu dapat mempengaruhi perubahan masyarakat secara keseluruhan D. Dampak terhadap kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat yang tidak bersifat ekonomis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa telah memberikan dampak positif terhadap kebijakan audit dana desa. Walaupun masih terdapat kendala/ hambatan dengan Kebijakan Audit Dana Desa dengan menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa seperti Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Inspektorat Kota Prabumulih belum begitu menguasai aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa serta Keterbatasan pengetahuan dan

pemahaman sumber daya manusia, komunikasi yang tidak efektif antara Inspektorat Kota Prabumulih dengan perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta:Salemba Humanika.
- Aji, B. Firman. 1990. *Perencanaan dan Evaluasi*. Jakarta: Bina Aksara
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hamid, 2004. *Metode Pesewwdxnelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan ProposalDan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Ibrahim dan Zubainur, C.M. 2015. "Integrative Curriculum In Teaching Science In The Elementary School". *Research World, Journal of Arts, Science & Commerce*, Vol. VI, Issue 4, pp. 45-54.
- Islamy,1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara
- Iskandar. 2014. "Evaluasi Pembelajaran Tematik Dilihat Dari Hasil Belajar Siswa". *Indonesian Journal of Curriculum and Educational Technology Studies*,
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press

- Siagian, Sondang P. 1989. *Sistem Informasi Manajemen Untuk Pengambilan Keputusan*. Jakarta. Sinar Grafika
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tayibnafis, 2004. *Evaluasi program*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.